

**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**



**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu atas target kinerja dan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020. Dengan harapan laporan kinerja ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif, dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2020 dan menjadi acuan yang berkesinambungan dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah. Masukkan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Putussibau, Januari 2021  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kabupaten Kapuas Hulu



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama tahun 2020 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2017-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020 memiliki sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator. Realisasi target kinerja menunjukkan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2020 dikategorikan berhasil. Diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. UMUM .....	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK .....	2
C. PERMASALAHAN UTAMA .....	12
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK .....	28
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	30
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
1. Pengukuran Kinerja	
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
B. REALISASI ANGGARAN .....	40
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
LAMPIRAN :	
1. Pengukuran Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik	
2. Perjanjian Kinerja 2020	
3. Buku Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020	
4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020	
5. Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat	
6. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Utama	10
Tabel 1.3	Nama Domain dan Sub Domain OPD Kabupaten Kapuas Hulu	13
Tabel 1.4	Nama Domain Website Desa	15
Tabel 1.5	Data Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) Bantuan Dari Kementerian	19
Tabel 1.6	Data Pembangunan Jaringan Akses Internet Bantuan Dari Kementerian	20
Tabel 1.7	Data Media Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2020	30
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran	34
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	35
Tabel 3.5	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)	36
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	38
Tabel 3.8	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan data statistic sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	39
Tabel 3.10	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	39
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)	40
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Tidak Langsung	41
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Langsung	42
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2017-2021, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dan digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk tahun-tahun berikutnya, karena tahun 2020 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021, maka pada laporan kinerja tahun 2020 akan dianalisis sebagai capaian awal atau pondasi dalam rangka mencapai target Renstra tahun 2017-2021.

## 1. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Pelaporan ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2020 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang disusun pada awal tahun. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran serta target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun **2017-2021**.

### b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2020.

## B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

## 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- b. Fungsi Kepala Dinas
  1. Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan instansi lainnya;
  3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  5. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Dinas;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.
- b. Fungsi:
  1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
  2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;



5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat, dibantu oleh Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Aparatur.

## **2.1 Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan program kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;

- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sub Bagian Umum dan Aparatur**

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas. Sub Bagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur ;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik**

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;

- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- c. Pembinaan komunikasi dan media publik;
- d. Pengelolaan informasi publik;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.1 Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik**

Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan komunikasi dan media publik. Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi dan Media Publik;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan media publik;
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. Penyediaan akses informasi di kabupaten;
- f. Pembinaan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2 Kepala Seksi Pengelolaan Informasi**

Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dan informasi publik dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik. Kepala Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
- d. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. Pelayanan informasi publik;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika**

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Statistik dan Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;

- c. pelaksanaan statistik sektoral;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4.1 Kepala Seksi Statistik**

Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan statistik sektoral. Dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan statistik sektoral;
- d. pemberian dukungan survei skala nasional di tingkat kabupaten;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2 Seksi Aplikasi Informatika**

Kepala Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi

informatika. Kepala Seksi Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. pengelolaan nama domain serta pengelolaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah;
- d. pemberdayaan informatika meliputi *data center*, *disaster recovery center*, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pengembangan internet dan penggunaan akses internet pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten;
- e. pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan di kabupaten;
- f. pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di kabupaten serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Aplikasi Informatika; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah dan kualitas SDM merupakan salah satu elemen penting dalam suatu organisasi sebagai penentu keberhasilan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			K e t
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	2	-	1	1	-	-	-	1	-
4.	SARJANA MUDA	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	SARJANA	11	-	-	11	-	-	1	5	-
6.	PASCA SARJANA	2	-	-	-	2	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>		16	-	1	13	2	1	2	6	-

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 2 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 13 orang yang termasuk penyiari LPPL Rasika-FM.

### 1.3. SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2020.

#### 1.4. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Sarana dan Prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Utama**

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	3	Baik
2	Mobil	2	1 Rusak/ 1 Baik
3	Sepeda Motor	11	Baik
4	Komputer	14	Baik
5	NoteBook	12	Baik
6	Laptop	13	Baik
7	Televisi	4	3 Baik/ 1 rusak
8	Kamera Digital	3	Baik
9	Kamera electronic	2	Baik
10	Genset	1	Baik
11	Meja Kerja	15	Baik
12	Kursi Kerja	9	Baik



13	Lemari Arsip	2	Baik
14	Air Conditioner (AC)	7	1 Baik/ 6 rusak berat
15	Camcoder	2	Baik
16	Printer	14	11 Baik/ 3 rusak berat
17	Kursi tamu	3	baik
18	Drone	1	baik

### C. PERMASALAHAN UTAMA (ISSUE STRATEGIS)

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Permasalahan Utama (issue Strategis) yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan layanan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

## 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu sampai Tahun 2020

Dalam pengelolaan website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selalu memberikan informasi yang *up to date* baik berita maupun informasi yang lainnya.

Sementara untuk jumlah *update* konten website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Website Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kapuas Hulu yang di *upload* adalah sebagai berikut :

NO.	WEB SITE	TRIWULAN				TOTAL
		I	II	III	VI	
1.	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	18	14	13	25	70
2.	DISKOMINFOTIK	13	8	11	16	48
JUMLAH		31	22	24	41	118

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

- Banyaknya informasi yang di terima masyarakat bukan tentang pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Banyak berita hoax yang disampaikan melalui media soail;
- Jaringan akses internet sering terjadi putus koneksi..

## 2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat Presiden yaitu peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan penerapan SPBE diantaranya terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan.

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang disampaikan melalui akun Kabupaten Kapuas Hulu [monev.spbe.go.id](http://monev.spbe.go.id). Bahwa hasil evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dari Kementerian PANRB mendapat **Nilai Indeks SPBE = 2.60** dengan **Predikat SPBE = BAIK**. Adapun penilaian SPBE dari tahun 2018 – tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	NILAI SPBE	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Nilai Indeks	1,93	2,60	2,60
2	Nilai Predikat	Cukup	Baik	Baik

Bahwa Evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mana beberapa kegiatan pendukung terpaksa dibatalkan.

Untuk diketahui bahwa dalam penerapan SPBE terdapat 3 Domain dan 37 Indikator yang dievaluasi dan dinilai, dimana dalam mengevaluasi SPBE melibatkan semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Harapan kedepan sesuai dengan pengalaman dan hasil rekomendasi dari Kementerian PANRB dalam mengevaluasi SPBE kita dapat meningkatkan Nilai Indikator SPBE Kabupaten Kapuas Hulu serta secara prinsip dapat mendorong seluruh OPD dalam mengimplementasikan kebijakan internal, tatakelola dan layanan SPBE.

Adapun dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak permasalahan diantaranya adalah :

- Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan;
- Tata kelola tidak terpadu;
- Penerapan pelayanan belum optimal;
- Jumlah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE masih terbatas;

- e. Masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah;
- f. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi; dan
- g. Pengelolaan keamanan informasi lemah di system seluruh instansi pemerintah.

Sehingga dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) menimbulkan dampak system seperti pemborosan biaya, reputasi menurun dan terganggunya pengoperasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan permasalahan diatas dan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maka pimpinan kepala daerah berkewajiban melakukan akselerasi perbaikan pada domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik. Salah satu keluaran dari domain kebijakan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-government*).

### 3. Kegiatan Layanan Nama Domain Dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik Dan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas

Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah mengelola **1 Domain** Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, hasil monitoring terdapat sebanyak **34 Domain desa.id.** dan terdapat **52 Subdomain** yang di Kelola oleh dinas Komunikasi, Onformatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

. Adapun daftar nama domain, subdomain lembaga, layanan publik dan kegiatan dan website desa diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DILINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
*(Keadaan per 31 Desember 2020)*

## I. Nama Domain

### a. Daftar Nama Domain Website Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	NAMA DOMAIN	PENGELOLA
1	www.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>

### b. Daftar Nama Domain Website Desa.id

NO.	NAMA DOMAIN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	nangabetung.desa.id	Nanga Betung	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu
2	sriwangi.desa.id	Sriwangi	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu
3	labian.desa.id	Labian	Batang Lupar	Kapuas Hulu
4	sepandan.desa.id	Sepandan	Batang Lupar	Kapuas Hulu
5	mensiau.desa.id	Mensiau	Batang Lupar	Kapuas Hulu
6	lanjakderas.desa.id	Lanjak Deras	Batang Lupar	Kapuas Hulu
7	boyantanjung.desa.id	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu
8	sungaiabau.desa.id	Sungai Abau	Batang Lupar	Kapuas Hulu
9	senunuk.desa.id	Senunuk	Batang Lupar	Kapuas Hulu
10	tanimakmur.desa.id	Tani Makmur	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
11	mentawit.desa.id	Mentawit	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
12	setulang-batanglupar.desa.id	Setulang	Batang Lupar	Kapuas Hulu
13	kenerak.desa.id	Kenerak	Semitau	Kapuas Hulu
14	semitauhulu.desa.id	Semitau Hulu	Semitau	Kapuas Hulu
15	mubung.desa.id	Mubung	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
16	labianiraang.desa.id	Labian Ira'ang	Batang Lupar	Kapuas Hulu
17	nangajemah.desa.id	Nanga Jemah	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu
18	melemba.desa.id	Melemba	Batang Lupar	Kapuas Hulu
19	tunasmuda.desa.id	Tunas Muda	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
20	kelakar.desa.id	Kelakar	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
21	simpangsenara.desa.id	Simpang Senara	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
22	tekalong.desa.id	Tekalong	Mentebah	Kapuas Hulu
23	riampiyang.desa.id	Riam Piyang	Bunut Hulu	Kapuas Hulu
24	nangatepuai.desa.id	Ranga Tepuai	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
25	segiam.desa.id	Segiam	Kalis	Kapuas Hulu
26	jongkongkanan.desa.id	Jongkong Kanan	Jongkong	Kapuas Hulu
27	rantaubumbun.desa.id	Rantau Bumbun	Kalis	Kapuas Hulu
28	nangasangan.desa.id	Nanga Sangan	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu
29	miaumerah.desa.id	Miau Merah	Silat Hilir	Kapuas Hulu
30	sungaiantu.desa.id	Sungai Antu	Puring Kencana	Kapuas Hulu
31	marsedanraya.desa.id	Marsedan Raya	Semitau	Kapuas Hulu
32	beringin.desa.id	Beringin	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
33	sejahteramandiri.desa.id	Sejahtera Mandiri	Hulu Gurung	Kapuas Hulu
34	teluksindur.desa.id	Teluk Sindur	Bika	Kapuas Hulu

## II. Nama Sub Domain

### a. Nama Subdomain Website Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	NAMA SUB DOMAIN	PENGELOLA
<b>A</b>	<b>SUB DOMAIN OPD</b>	
1	inspektorat.kapuashulukab.go.id	Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
2	dprd.kapuashulukab.go.id	Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
3	bappeda.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4	bkd.kapuashulukab.go.id	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5	bppd.kapuashulukab.go.id	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6	bpbd.kapuashulukab.go.id	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7	bkpsdm.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
8	dinkes.kapuashulukab.go.id	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
9	disporapar.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
10	dukcapil.kapuashulukab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
11	diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
12	disperpusip.kapuashulukab.go.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
13	disciptakarya.kapuashulukab.go.id	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
14	diskup.kapuashulukab.go.id	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu
15	dislingkunganhidup.kapuashulukab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu
16	disbinamarga.kapuashulukab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu
17	dpmptsp.kapuashulukab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
18	diskan.kapuashulukab.go.id	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
19	disnakertrans.kapuashulukab.go.id	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
20	pemasdes.kapuashulukab.go.id	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu
21	dishub.kapuashulukab.go.id	Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
22	dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
23	distanpangan.kapuashulukab.go.id	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
24	disdikbud.kapuashulukab.go.id	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu



25	satpolpp.kapuashulukab.go.id	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
26	bpbj-setda.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
27	kec-badau.kapuashulukab.go.id	Kecamatan Badau
28	rsudap.kapuashulukab.go.id	RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau
<b>B</b>	<b>SUB DOMAIN KEGIATAN</b>	
1	jdih.kapuashulukab.go.id	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2	lpse.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3	simbaja.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4	eproject.kapuashulukab.go.id	Bagian Pengadaan Barang Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5	smep.kapuashulukab.go.id	Bagian Perekonomian dan pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6	lppd.kapuashulukab.go.id	Bagian Pemerintahan Pada Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu
7	sakip.kapuashulukab.go.id	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8	sianjab.kapuashulukab.go.id	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9	siipro.kapuashulukab.go.id	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
10	ppid.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
11	e-ppid.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
12	statistiksektoral.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
13	bukutamu-diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
14	arsip.diskominfo.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
15	info.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
16	covid19.kapuashulukab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
17	fds.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
18	pariwisata.kapuashulukab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu
19	siak.kapuashulukab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
20	geoportal.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
21	cloud.kapuashulukab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
22	sirala.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
23	ekinerja.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

24	eprilaku360.kapuashulukab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
JUMLAH A+B		52

#### 4. Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Bahwa ketersediaan jaringan Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu yang menjadi penunjang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara Jaringan Akses internet merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika sementara Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu baru memberi layanan Jaringan Internet 1 Lokasi untuk Media Center Kapuas Hulu dan 1 Lokasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

- Belum terpusatnya jaringan akses internet di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- Belum tersedianya anggaran untuk layanan jaringan internet dan intra pemerintah untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kabupaten Kapuas Hulu;
- Besarnya anggaran untuk kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- Belum adanya penetapan ruang public di Kabupaten Kapuas Hulu.



## 5. Kegiatan Peningkatan SDM Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik

Aspek penting dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Sumber Daya Manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi (*e-Skills*) dan kompetensi dalam mengimplementasikan konsep-konsep pelayanan berbasis elektronik.

Bahwa adanya pandemi Covid-19 sehingga untuk menghindari krumunan dan penularan serta adanya pemotongan anggaran sebesar 50% maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat melaksanakan kegiatan **Peningkatan SDM Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik.**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

1. Minimnya pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki sertifikasi berbasis IT;
2. Tidak semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki pejabat fungsional Pranata Komputer.

## 6. Kegiatan Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Yang Terintegrasi

Dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas Hulu bahwa dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan mengeluarkan 4 aplikasi pendukung pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu akan tetapi hanya dapat mengeluarkan 3 (tiga) aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Website Kecamatan ( Kecamatan Badau) dengan *Ulr*: kec-badau.kapuashulukab.go.id.
2. Aplikasi Buku Tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
3. Aplikasi Website Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

1. Dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi masih belum sepenuhnya di kembangkan atau di kelola oleh dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Masing masih OPD membuat dan mengembangkan aplikasi dan tanpa melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kabupaten Kapuas Hulu.

#### **7. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Program Penyediaan KPU/USO**

Mengingat pentingnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan akses internet dalam pemanfaatan perangkat teknologi sebagai kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintahan adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Data usulan yang di sampaikan yang menjadi syarat usulan sering tidak lengkap;
2. Pemohon dalam menyampaikan kekurangan persyaratan usulan sangat lama;
3. Susahnya menghubungi pihak pemohon;
4. Belum terealisasinya pembangunan BTS dan Akses Internet Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 dikarenakan pandemik covid 19.

Sementara untuk hasil keluaran kegiatan ini dalam memfasilitasi usulan bantuan jaringan telekomunikasi maupun jaringan akses internet tahun 2020 sebanyak **25 usulan** lokasi jaringan Telekomunikasi (BTS dan Akses Internet yang difasilitasi di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun daftar bantuan pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan akses internet di Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

**DATA PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI (BTS)  
BANTUAN DARI KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA**  
(Keadaan per 31 Desember 2020)

NO.	NAMA SITE / DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TAHUN BANTUAN
1	Sungai Uluk Palin	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2016
2	Lauk	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2016
3	Bungan Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2016
4	Kereho	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2016
5	Rantau Prapat	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2016
6	Ulak Pauk	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2016
7	Kantuk Asam	Puring Kencana	Kapuas Hulu	2016
8	Pamtas Kantuk Asam	Puring Kencana	Kapuas Hulu	2016
9	Melemba	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2016
10	Sungai Senunuk	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2016
11	Labian	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2016
12	Tani Makmur	Hulu Gurung	Kapuas Hulu	2017
13	Ujung Said	Jongkong	Kapuas Hulu	2017
14	Nanga Lauk	Embaloh Hilir	Kapuas Hulu	2017
15	Nanga Boyan	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu	2017
16	Nanga Jemah	Boyan Tanjung	Kapuas Hulu	2017
17	Sekubah	Selimbau	Kapuas Hulu	2017
18	Setulang	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2017
19	Pulau Majang	Badau	Kapuas Hulu	2017
20	Riam Tapang	Silat Hulu	Kapuas Hulu	2017
21	Batu Lintang	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2018
22	Menua Sadap	Embaloh Hulu	Kapuas Hulu	2018
23	Dusun Mata Lunai, Desa Beringin Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2018
24	Dusun Nanga Balang, Desa Beringin Jaya	Putussibau Selatan	Kapuas Hulu	2018
25	Pamtas Klawik	Batang Lupar	Kapuas Hulu	2018
26	Nanga Awin	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2018
27	Entibab	Bunut Hilir	Kapuas Hulu	2018
28	Nanga Nyabau	Putussibau Utara	Kapuas Hulu	2019
29	Nanga Luan	Silat Hulu	Kapuas Hulu	2019
30	Nanga Kelibang	Bunut Hulu	Kapuas Hulu	2019
<b>J U M L A H</b>				<b>30</b>



**Tabel 1.6**  
**DATA PEMBANGUNAN JARINGAN AKSES INTERNET**  
**BANTUAN DARI KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA**  
*(Keadaan per 31 Desember 2020)*

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LOKASI	TAHUN BANTUAN
1	Sungai Antu	Puring Kencana	Kantor Desa Sungai Antu	2015
2	Putussibau Kota	Putussibau Utara	Media Center Kapuas Hulu	2016
3	Putussibau Kota	Putussibau Utara	SMA Karya Budi Putussibau	2016
4	Hilir Kantor	Putussibau Utara	Madrasah Aliyah Negeri Putussibau	2016
5	Hilir kantor	Putussibau Utara	SMA Muhammadiyah Putussibau	2016
6	Kedamn Hilir	Putussibau Selatan	SMA Negeri 2 Putussibau	2016
7	Kedamin Hulu	Putussibau Selatan	SMA Negeri 2 Putussibau	2016
8	Tanjung Jati	Putussibau Selatan	KIM "Sekilas Info"	2016
9	Tekudak	Kalis	KIM "Nandang Pasulang"	2016
10	Tekalong	Mentebah	KIM "Nandang Tekalong"	2016
11	Sungai Besar	Bunut Hulu	KIM "Ketam Bersatu"	2016
12	Bunut Hulu	Bunut Hulu	Kantor Desa Bunut Hulu (KIM Surya Dirja)	2016
13	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	Pesantren "Al-Jihad"	2016
14	Jeranjang	Seberuang	Kantor Desa Jeranjang	2016
15	Bukuan	Seberuang	Kantor Desa Bekuan	2016
16	Piasak Hulu	Selimbau	Kantor Desa Piasak Hulu	2016
17	Titian Kuala	Selimbau	Kantor Desa Titian Kuala	2016
18	Bati	Sebruang	KIM "Piasak Info"	2017
19	Gerayau	Selimbau	Desa Grayu	2017
20	Seriang	Badau	KPH "Kesatuan Pengelola Hutan"	2017
21	Kandung Suli	Jongkong	Kantor Desa Kandung Suli	2018
22	Jongkong Kiri Hulu	Jongkong	Kantor Desa Jongking Kiri Hulu	2018
23	Entibab	Bunut Hilir	Kantor Desa Entibab	2018
24	Nanga Suhaid	Suhaid	Sekretariat KIM "Entungan"	2018
25	Nanga Suhaid	Suhaid	SMA Nanga Suhai	2018
26	Benuis	Selimbau	Kantor Desa Benuis	2018
27	Kelakar	Hulu Gurung	Kantor Desa Kelakar	2018
28	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	SMA N 1 Hulu Gurung	2018
29	Jongkong	Jongkong	SMA N 1 Jongkong	2019
30	Jongkong Kanan	Jongkong	MTs N 3 Jongkong	2019
31	Tepuai	Hulu Gurung	SMP N 2 Hulu Gurung	2019
32	Sejahtera Mandiri	Hulu Gurung	Kantor Desa Sejahtera Mandiri	2019
33	Bugang	Hulu Gurung	Kantor Desa Bugang	2019

34	Lubuk Antuk	Hulu Gurung	Kantor Desa Lubuk Antu	2019
35	Riampiang	Bunut Hulu	Kantor Desa Riam Piang	2019
36	Nanga Semangut	Bunut Hulu	Balai Desa Nanga Semangut	2019
37	Badau	Badau	BLC Kantor Camat Badau	2019
38	Bunut Hilir	Bunut Hilir	SMP N 1 Bunut Hilir	2019
39	Bunut Hilir	Bunut Hilir	SMP N 5 Bunut Hilir	2019
40	Tepuai	Hulu Gurung	SMK N Hulu Gurung	2019
41	Sendan	Batang Lupar	SMP N 1 Batang Lupar	2019
42	Lunsara	Putussibau Selatan	SMP N 9 Putussibau	2019
JUMLAH				42

## 8. Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam melaksanakan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu diperlukannya kerjasama dengan OPD terkait seperti salah satunya adalah dengan pembentukan Tim Penunjang (Admin) Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu di masing-masing OPD. Hal ini bertujuan agar pengumpulan data lebih mudah dilakukan dan lebih efektif dalam memverifikasi dan memvalidasi data statistik sektoral dari tiap OPD Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Terlambatnya OPD mengembalikan form isian data yang mengakibatkan keterlambatan dalam penginputan data;
- Tidak sinkronnya data yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya dan disampaikan kembali tahun ini sehingga perlu dilakukan verifikasi kembali;
- Data yang dikumpulkan masih berupa form isian data dan belum menggunakan aplikasi;
- Banyaknya data yang tidak saling bersesuaian antara satu instansi dengan instansi yang lain;
- Adanya pengurangan anggaran karena pandemik covid 19 sehingga dokumen data statistik sektoral yang awalnya direncanakan dicetak sebanyak 140 buku tidak mencapai target dan hanya dicetak 100 buku.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut perlunya optimalisasi Tim Penunjang (Admin) pada masing-masing OPD baik dalam pengembalian form isian data maupun verifikasi data yang tidak sesuai

agar pengolahan data tepat waktu. Selain itu perlu menetapkan standard dan metadata yang menjadi pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral untuk mencapai kesesuaian data.

Sementara untuk hasil keluaran kegiatan penyusunan data statistik sektoral tahun 2020 adalah **1 dokumen** data statistik sektoral yang dicetak sebanyak **100 buku** dan data dihimpun dari **26 OPD, 17 Instansi Vertikal** dan **1 BUMD**.

#### 9. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media elektronik dilakukan menggunakan beberapa platform media public diantaranya kanal TV kabel, Web Portal, media social seperti Youtube, Instagram dan Fanpage dan Radio.

Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 terletak pada kendala teknis media informasi dan komunikasi LPPL Rasika 103,4 FM. Dimana pada bulan oktober 2019, LPPL Rasika berhenti beroperasi dikarenakan perangkat Booster, Composer dan Mixer mengalami rusak berat sehingga siaran Radio tidak dapat dilakukan. Tidak beroperasinya radio ini mengakibatkan konten informasi yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat pada wilayah desa/dusun menjadi tidak dapat diterima.

Pada tahun 2020 pengadaan perangkat baru telah di anggarkan pada RKA/DPA Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik, namun karena adanya refocusing yang diakibatkan pandemic covid-19 mengakibatkan kegiatan pengadaan perangkat Radio baru harus dibatalkan dan dialihkan biaya perbaikan perangkat yang lama, sehingga pada bulan Desember 2020 radio Rasika bias mengudara kembali, namun jangkauannya tetap tidak maksimal. Radio Rasika hanya menjangkau 7 Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kapuas Hulu yaitu

Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Bika, Embaloh hilir, Bunut Hilir, Kalis dan Mentebah.

#### **10. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Kegiatan dokumentasi pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan pencarian informasi, pengolahan sampai dengan pendokumentasian dalam berbagai format (text, mp4, mp3 dan konten digital). Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah tenaga liputan dan pengolah hasil liputan sehingga belum dapat menangani semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Perangkat liputan dan pengolahan hasil liputan (memory, kamera, comcoder dan computer editing), yang terbatas dan beberapa perlu peremajaan;
- c. Operasional pembiayaan perjalanan tim liputan yang terbatas, sehingga tidak dapat menangani semua kegiatan yang telah terjadwal.

#### **11. Kegiatan Pembinaan Program Desa Teknologi Komunikasi dan Informasi.**

Kegiatan Pembinaan Program Desa Teknologi Komunikasi dan Informasi ini dalam bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) yang telah dibentuk, dengan memprioritaskan kepada desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Adapun Daftar KIM yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 1. 7

**Data Media Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

NO	NAMA KIM	DESA	KECAMATAN
1	BUKIT BIRU	SEJIRAM	SEBERUANG
2	S A R I D A N	NANGA SEBINTANG	KALIS
3	SEKILAS INFO	TANJUNG JATI	PUTUSSIBAU SELATAN
4	DENGAH	TANJUNG KARANG	PUTUSSIBAU UTARA
5	NANDANG TEKALONG	TEKALONG	MENTEBAH
6	KETAM BERSATU	SUNGAI BESAR	BUNUT HULU
7	NANDANG PASULANG	TEKUDAK	KALIS
8	KEDAUANG MAHKOTA INFO	NIBUNG	SELIMBAU
9	SURA DIRJA	BUNUT HULU	BUNUT HILIR
10	PIASAK INFO	PIASAK HILIR	SELIMBAU
11	DANGONA BANUAKA	ULAK PAUK	EMBALOH HULU
12	PODI INFORMATIKA	MARTADANA	PENGKADAN
13.	AMSKER MANIA	HULU GURUNG	KELAKAR



14	AMPAN INFORMATIKA	PERMATA	PENGKADAN
15	MADU MANIS	NANGA LAUK	EMBALOH HILIR
16	ENTUNGAN HULU	NANGA SUHAID	SUHAID
17	JURNALIS WARGA PERBATASAN ( JURAGAN )	PUTUSSIBAU KOTA	PUTUSSIBAU UTARA
18	TEBINGAK INFORMASI	DESA JONGKONG TANJUNG	JONGKONG
19	BERUNYAU PERMAI DIGITAL	DESA RIAM PIANG	BUNUT HULU
20	KABAN MAYAS	DESA MELEMBA	BATANG LUPAR
21.	BUYAN LITERASI	BOYAN TANJUNG	DESA NANGA BETUNG

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepada KIM yaitu banyak anggota KIM dibentuk hanya untuk mendapatkan fasilitas Internet gratis dari Kementerian Kominfo, setelah mendapat fasilitas Internetnya KIM tidak terlalu aktif menyampaikan informasi kepada Diskominfo sebagai Pembina mereka.

## 12. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Masyarakat melalui Sistem Informasi Layanan Publik

Di luar Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan. Keberadaan Aplikasi LAPOR Pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi didelapan kecamatan, yaitu kecamatan Embaloh Hulu, Batang Lupar dan Badau di wilayah utara, sedangkan di wilayah selatan meliputi kecamatan Kalis, Mentebah, Boyan Tanjung, Pengkadan dan Hulu Gurung. Belum

semua kecamatan biasa dilakukan sosialisasi pada tahun 2020 dikarenakan keterbatasan sumber daya baik dari sisi pembiayaan maupun personil. Jumlah data laporan yang masuk pada aplikasi LAPOR tahun 2020 mencapai 29 laporan, dan semua sudah di disposisikan oleh admin utama ke OPD terkait dan sudah ditindak lanjuti.

### **13. Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi**

Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi merupakan operasional dari pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil visitasi dan pemeringkatan dari Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat, sebagai Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2020 tetap berada di zona hijau sebagai Kabupaten Informatif yang berada di peringkat ke Lima untuk kategori PPID Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat.

Adapun yang masih menjadi kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah :

- a. Belum tersedianya informasi yang dikecualikan, dimana jenis informasi ini harus disusun dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Permintaan daftar Informasi yang dikecualikan sudah dilakukan pada tahap awal, yaitu permintaan data informasi kepada seluruh OPD, namun belum mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Pemanfaatan aplikasi PPID yang belum optimal, hal ini terjadi karena aplikasi PPID yang digunakan merupakan aplikasi berbagi pakai dari Kementerian Dalam Negeri. Pada Tahun 2020, aplikasi ini mengalami Beberapa penyempurnaan sehingga beberapa fungsi (khususnya disposisi antara PPID Utama dan PPID Pembantu)



belum dapat dilakukan. Namun pada Tahun 2021, PPID Utama akan melakukan penyegaran terhadap operator aplikasi PPID dan akan memberikan workshop terkait dengan fungsi disposisi pada aplikasi PPID tersebut.

## **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

#### **1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan tujuan ini Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- b. Meningkatkan kualitas data Statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2017-2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik
- d. Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral.

Lebih jelas mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakin	-	CC	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	-	-	1,93	2,60	2,70	2,85
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	77	80	82
2	Meningkatkan kualitas data statistik lintas sektoral kabupaten Kapuas hulu	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	-	100%	100%	100%	100%	100%

## B. PERJANJIAN KINERJA.

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.



**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran E-gov	Indek SPBE	2,70
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### 1. Pengukuran Kinerja

##### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan



menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100: Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$ : Berhasil
- $55 \leq X < 70$ : Cukup Berhasil
- $< 55$ : Tidak Berhasil

Untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama. Dengan demikian kinerja utama tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 yaitu dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB	BB	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,70	2,60	96%

3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,83	102%
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100 %	100%	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kab. Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	102%
2	Berhasil	2	100 %
3	Cukup Berhasil	1	96 %
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) dengan capaian 102%, 2 (Dua) berhasil dengan capaian 100% dan cukup berhasil Nilai 1 (satu).

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Capaian Kinerja	Jumlah sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	102%
2	Berhasil	2	100 %
3	Cukup Berhasil	1	96 %
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 4 (empat) sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) sasaran dengan capaian sebesar 102%, 2 (Dua) berhasil dengan capaian 100% dan cukup berhasil Nilai 1 (satu).

## **2. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

### **Sasaran 1 :Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja yang dilaksanakan Oleh Inspektorat daerah untuk Tahun 2020 belum keluar.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada berbagai tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1**  
**Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas**  
**Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019 yang di nilai di Tahun**  
**2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	%	BB	BB	100
Capaian sasaran (100%)					

**Tabel 3.5**  
**Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1**  
**Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Predikat SAKIP	-	-	-	CC	CC	100	B	BB	200	BB	BB	100	BB	-	-

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1**  
**Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)**

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP	BB	-	-

Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indicator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

**Indikator : Predikat SAKIP**

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi Inspektorat Tahun 2017 mendapat

predikat **CC (59,06 poin)** sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian sasaran 100% dan pada Tahun 2018 target predikat SAKIP OPD B , hasil predikat yang di peroleh adalah **BB (72,90 poin)**.

Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu untuk Tahun 2019 menargetkan Predikat SAKIP BB dan setelah Laporan hasil evaluasi SAKIP dengan Nomor : 700/075/LHE/INKAB/IB4 pada tanggal 1 Juli 2020 dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan predikat SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan hasil **BB (73,92 poin)**.

Nilai BB ini mencerminkan bahwa Renstra yang disusun dengan baik, Akuntabel, indicator pencapaian kinerja yang jelas dan terukur, evaluasi atas program dan kinerja telah dilakukan, serta capaian target indicator juga tercapai.

Berdasarkan hasil nilai BB yang di peroleh, Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu untuk tahun 2020 menargetkan mempertahankan nilai BB dengan melengkapi kekurangan dokumen yang belum lengkap.

## **Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran E-gov**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat Presiden yaitu peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan penerapan SPBE diantaranya terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan.

### **Indikator :Indek SPBE**

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2018 memiliki nilai **indek SPBE 1,93** dengan predikat **CUKUP**. Sedangkan untuk tahun 2019 hasil evaluasi **Indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu mendapat **nilai 2,60** dengan predikat **BAIK** sesuai dengan target yang di inginkan dan tahun 2020 hasil

evaluasi **Indeks SPBE** Kabupaten Kapuas Hulu Kembali mendapat **nilai 2,60** dengan predikat **BAIK** (terlampir). Walaupun belum memenuhi target 2,70 di karenakan evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mana beberapa kegiatan pendukung terpaksa dibatalkan.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public**

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public” dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai table di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan public dan informasi public**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	81,83	102
Capaian sasaran Berhasil (102% )					

**Tabel 3.8**  
**Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3**  
**Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
		Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	100	80	81,83	102

**Indikator :Indeks Kepuasan Masyarakat**

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat baru pada Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan menyebarkan survey secara daring/online ke publik di Kab. Kapuas Hulu dengan hasil nilai 81,83 predikat mutu pelayanan BAIK di atas target. Capaian tersebut dapat dilihat pada lampiran 5.

**Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.**

Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu yang disajikan sebagai data indicator dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan kegiatan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak guna keperluan analisis sebagai kegiatan lainnya, dimana data tersebut dihimpun dari berbagai lintas sektoral yang menyangkut aspek Fisik, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan yang disajikan dalam bentuk table maupun grafik.

Publikasi Data Statistik Sektoral Kab. Kapuas Hulu tahun 2020 dapat dipergunakan oleh seluruh instansi untuk menyusun rencana pembangunan secara terintegrasi dan terkoordinasi di Kab. Kapuas hulu sehingga arahan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara tepat, sesuai dan berkesinambungan.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya pengelolaan data statistic Lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.” dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai table di bawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4**  
**Meningkatnya pengelolaan data statistic sektoral Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	%	100%	100%	100%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100% )					

**Tabel 3.10**  
**Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4**  
**Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4**  
**Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)**

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Data Statistik Sektorial Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar 100% dikategorikan “Sangat Berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indicator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

**Indikator : Persentase data statistic sektoral Kab. Kapuas Hulu yang valid**

Realisasi kinerja Indikator Persentase kompilasi ketersediaan data statistic lintas sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut sesuai dengan target yang di tetapkan sebesar 100%.

Realisasi kinerja indicator Persentase kompilasi ketersediaan data statistic lintas sektoral Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 sama dengan realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 100%. Hasil keluaran kegiatan penyusunan data statistik sektoral tahun 2020 adalah **1 dokumen** data statistik sektoral yang dicetak sebanyak **100 buku** dan data dihimpun dari **26 OPD, 17 Instansi Vertikal** dan **1 BUMD**.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan anggaran terkait dengan terjadinya pandemic COVID-19, YAITU ;

1. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 4.937.420.312,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.640.369.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.297.051.312,00.
2. Selanjutnya APBD Penyempurnaan/Perubahan COVID-19 anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 3.707.737.662,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.640.369.662,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.067.368.662,00.
3. Pada akhir tahun anggaran, APBD-P Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terealisasi sebesar Rp. 3.937.763.442,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.594.114.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.343.649.422,00.

Perubahan anggaran dari APBD ke APBD-P berkurang sebesar Rp. 907.151.870,00 (-18,37%) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 46.255.000,00 (-2,82%) dan Anggaran Belanja Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 953.406.870,00 (-28,92%).

Pada akhir Tahun Anggaran 2020 Persentase anggaran sebesar 97,46%, persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 96,73% dan Belanja Langsung sebesar 97,95%. Untuk Belanja Langsung Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 8 program (7 Program berjalan, 1 program tidak berjalan karena pemotongan anggaran covid 19) dan 39 kegiatan (37 kegiatan berjalan, 2 kegiatan tidak berjalan karena pemotongan anggaran covid 19).

## 1. Realisasi Belanja

### a. Tidak Langsung

Realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	840.598.000	815.189.280	96,98
2	Tunjangan Keluarga	96.200.000	92.852.860	96,52
3	Tunjangan Jabatan	118.516.000	112.985.000	95,33
4	Tunjangan Fungsional	7.674.000	7.560.000	98,51
5	Tunjangan Fungsional Umum	16.981.000	16.370.000	96,40
6	Tunjangan Beras	50.168.000	48.231.720	96,14
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1.732.000	1.557.838	89,94
8	Pembulatan Gaji	14.000	13.881	99,15
9	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD	462.231.000	447.300.000	96,77
	<b>Total</b>	<b>1.594.114.000</b>	<b>1.542.060.579</b>	<b>96,73</b>

### b. Belanja Langsung

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Belanja Langsung**

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.268.071.153</b>	<b>1.237.585.163</b>	<b>97,60</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	118.044.000	109.996.163	93,18



3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	3.000.000	1.983.200	66,11
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.180.000	74.640.000	80,10
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Dan Kebersihan Kantor	63.076.000	63.051.000	99,96
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	98.598.220	98.598.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	58.047.133	58.046.800	100
8	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	3.255.800	3.250.000	99,82
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang –Undangan	13.000.000	13.000.000	100
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	138.600.000	138.600.000	100
11	Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	131.000.000	131.000.000	100
12	Rapat - Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	190.550.000	190.550.000	100
13	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	14.400.000	11.550.000	80,21
14	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Opd	5.000.000	5.000.000	100
15	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	30.000.000	30.000.000	100
16	Penyusunan Rka Dan Dpa	7.920.000	7.920.000	100
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	285.700.000	285.700.000	100
18	Penyediaan Jasa Publikasi	10.500.000	10.500.000	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>266.754.319</b>	<b>266.486.390</b>	<b>99,90</b>
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	99.606.252	99.488.690	99,88
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	103.148.067	103.147.700	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	64.000.000	63.850.000	99,77
<b>III</b>	<b>program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>	<b>119.188.000</b>	<b>118.932.866</b>	<b>99,79</b>



	<b>Sumber Daya Aparatur</b>			
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	119.188.000	118.932.866	99,79
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan OPD</b>	<b>19.612.200</b>	<b>19.612.200</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Opd	7.920.000	7.920.000	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.920.000	7.920.000	100
3	Penyusunan Rencana Kerja OPD	3.772.200	3.772.200	100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK</b>	<b>257.592.500</b>	<b>245.158.424</b>	<b>95,17</b>
1	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	71.607.160	64.991.550	90,76
2	Penyediaan Layanan Informasi Dokumentasi	39.674.300	39.144.100	98,66
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik	91.404.040	91.053.374	99,62
4	Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	27.307.000	22.369.500	81,92
5	Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Masyarakat Melalui Sistem Informasi Layanan Publik	27.600.000	27.599.900	100
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>97.633.200</b>	<b>97.437.200</b>	<b>99,80</b>
1	Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	97.633.200	97.437.200	99,80
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>314.798.050</b>	<b>310.483.895</b>	<b>98,63</b>
1	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe ) E-Government Kabupaten Kapuas Hulu	52.329.983	48.729.983	93,12
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu	60.524.800	60.274.800	99,59
3	Fasilitasi Dan Pendampingan Program Penyediaan Kpu/Uso	51.602.000	51.432.000	99,67
4	Layanan Akses Internet, Internet Dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12.227.500	12.224.800	99,98
5	Layanan Nama Domain Dan Sub Domain Bagi Lembaga,	22.131.267	21.839.812	98,68



	Pelayanan Publik Dan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu			
6	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik			
7	Layanan Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Terintegrasi	115.982.500	115.982.500	100

Tabel 3.14

### Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					
				REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4			ANGGARAN	REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat SAKIP	BB	-	-	BB	-	100% (hasil nilai sakiptahun 2019 yang dinilai ditahun 2020)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.268.071.153	-	-	-	1.237.585.163	97,60
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	266.754.319	-	-	-	266.486.390	99,90
									PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	-	-	-	-
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARA	119.188.000	-	118.932.866	-	-	99,79



									TUR						
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indeks SPBE	2,70	-	-	-	2,60	96%	PROGR AM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN OPD	19.612.200	19.612.200	-	-	-	100,00
									PROGR AM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	257.592.500	-	-	-	245.158.424	95,17
									PROGR AM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	97.633.200	-	-	-	97.437.200	99,80
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	-	-	-	81,83	102%	PROGR AM APLIKASI DAN INFORMATIKA	314.798.050	-	-	-	310.483.895	98,63



4	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektor	Persepsi Ketersediaan Data Statistik Sektor Kabupaten Kapuas Hulu	100%	50%	50%	-	-	100%								
---	---	---	------	-----	-----	---	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil/SDMserta sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya. Salah satu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020 kembali mendapatkan penghargaan sebagai **Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat** (terlampir) dan mendapat nilai **Indeks SPBE 2,60** dengan predikat **BAIK** (terlampir) walaupun belum mencapai target (2,70) karena evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mana beberapa kegiatan pendukung terpaksa dibatalkan.

Secara umum, seluruh target dari setiap sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020. Selain itu capaian tahun 2020 merupakan pondasi awal dalam rangka mencapai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2021. Realisasi target ini juga diikuti oleh keberhasilan realisasi anggaran yang rata-rata 97,46%.

Hasil capaian kinerja tersebut sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Perjanjian kinerja pada tahun 2019 merupakan faktor pendorong yang akan dijadikan sebagai acuan keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pencapaian visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu “**Terwujudnya**



***Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi***” sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya akan lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun berjalan. Capaian kinerja 2020 juga sudah sejalan dengan target prioritas pembangunan, hal ini dapat dilihat dari dukungan hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2020.



## Lampiran 1

**Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Predikat sakiP	BB	BB	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan E-gov	Indek SPBE	2,70	2,60	96%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,83	102%
4	Meningkatnya pengelolaan data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu yang Valid	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100%</b>

Putussibau, Januari 2021  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**Ir. ISTIWA, M.Si**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19650507 199803 1 006**



Lampiran 2



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006  
Email : [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id) Kode Pos 78711

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ISTIWA, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A.M. NASIR, SH

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

**Pihak Kedua**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A.M. NASIR, SH**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK,**

**Ir. ISTIWA, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650507 199803 1 006**

Lampiran 4

## Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020





Lampiran 3

### Buku Data Statistik Sektorial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020







lampiran 5

Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDER  
DAN PER UNSUR PELAYANAN  
LAYANAN DISKOMINFOTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO. RESPONDER	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	MUTU PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	4	3	4	4	3	3	2	3	4	
2	4	3	2	4	3	3	3	3	4	
3	4	3	2	4	3	3	3	3	2	
4	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
5	3	3	1	4	3	3	3	3	4	
6	4	3	1	4	3	3	3	3	4	
7	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
8	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
9	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
10	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
11	3	4	3	3	4	4	3	3	4	
12	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
13	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
14	3	4	3	4	3	4	4	4	4	
15	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
16	3	1	3	4	3	3	3	4	4	
17	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
18	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
19	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
20	2	4	3	4	3	3	3	3	4	
21	2	3	4	4	3	3	3	3	4	
22	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
23	3	3	4	3	4	3	3	3	4	
24	3	3	2	3	4	3	3	3	4	
25	3	3	3	3	4	4	3	3	4	
26	4	3	3	1	4	2	4	3	4	
27	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
28	4	3	3	4	4	4	4	2	4	
29	2	3	3	4	4	4	4	2	4	
30	3	3	3	4	4	4	4	2	4	
31	3	4	3	4	2	3	3	2	2	
32	3	4	3	4	4	3	3	2	2	
33	4	4	3	4	3	3	3	2	2	
34	3	4	3	4	3	3	3	4	2	
35	3	3	4	4	3	3	3	4	2	
36	3	3	4	4	3	3	3	4	2	
37	3	3	2	3	3	3	3	4	2	
38	3	3	2	2	2	3	3	4	2	
39	3	3	4	4	4	3	3	4	2	
40	4	3	4	4	4	3	3	4	2	
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
42	3	3	2	4	4	2	4	4	4	
43	3	3	2	4	4	3	4	3	4	
44	3	3	3	4	4	3	4	3	4	
45	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
46	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
47	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
48	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
49	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
50	4	4	3	3	3	3	3	3	4	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
52	4	3	3	3	3	3	3	3	4	
53	3	3	3	3	3	4	3	3	4	
54	3	3	4	2	3	4	3	2	4	
55	3	3	4	2	3	4	3	2	4	
56	3	4	4	4	3	4	3	2	4	
57	4	4	4	4	3	3	4	2	4	
58	4	4	4	4	3	3	4	2	4	
59	4	4	4	4	2	3	4	2	4	
60	3	4	4	4	4	3	4	2	4	
61	3	3	4	4	4	3	4	2	2	
62	3	3	3	4	4	3	4	3	1	
63	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
64	3	3	3	4	4	3	3	3	4	



65	4	3	3	4	3	3	3	3	4		
66	3	4	3	3	3	3	3	3	4		
67	3	4	3	3	3	2	3	3	4		
68	3	4	3	3	3	2	3	3	4		
69	3	4	3	3	3	3	3	1	4		
70	3	3	3	3	2	3	3	1	4		
71	4	3	3	4	2	3	3	1	4		
72	4	3	3	4	4	3	3	1	3		
73	4	3	4	4	4	3	4	2	3		
74	3	3	4	4	3	3	4	2	3		
75	3	3	4	4	3	3	3	4	3		
76	3	3	4	4	3	3	3	2	3		
77	4	3	4	4	3	3	3	2	4		
78	4	3	3	4	3	3	3	2	4		
79	3	3	3	4	3	2	3	2	4		
80	3	4	3	4	3	4	3	2	3		
81	4	4	3	3	3	4	3	2	4		
82	3	4	3	3	3	4	3	2	4		
83	3	4	3	3	3	4	3	2	4		
84	3	4	3	3	4	4	3	2	4		
85	3	1	3	3	4	4	4	2	4		
86	3	4	3	4	4	4	3	1	4		
87	3	4	3	4	2	4	3	1	4		
88	3	4	4	4	4	4	3	1	4		
89	4	4	4	4	4	4	4	1	4		
90	3	4	4	4	4	4	4	1	4		
91	3	3	3	4	3	4	4	2	4		
92	3	3	3	4	3	3	4	2	4		
93	4	3	3	3	3	3	4	2	4		
94	4	3	3	3	3	2	4	2	4		
95	3	3	3	3	3	4	4	2	4		
96	3	3	3	3	3	4	4	2	4		
97	4	3	3	3	3	4	4	2	4		
98	1	3	3	2	3	4	4	2	4		
99	4	3	3	2	3	4	4	2	4		
100	4	3	3	2	3	4	4	2	4		
JUMAH NILAI PER UNSUR	328	328	317	359	328	326	335	261	367		
NRR PER UNSUR	3.28	3.28	3.17	3.59	3.28	3.26	3.35	2.61	3.67		
NRR TERTIMBANG/UNSUR	0.36	0.36	0.35	0.40	0.36	0.36	0.37	0.29	0.41		
IKM UNIT PELAYANAN										81.83	B (BAIK)

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	PERSYARATAN	3.28
U2	PROSEDUR	3.28
U3	WAKTU PELAYANAN	3.17
U4	BIAYA/TARIF	3.59
U5	PRODUK LAYANAN	3.28
U6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.26
U7	PERILAKU PELAKSANA	3.35
U8	SARANA DAN PRASARANA	2.61
U9	PENANGANAN PENGADUAN	3.67

IKM UNIT PELAYANAN  
MUTU PELAYANAN :

- A (SANGAT BAIK) = 88,31 - 100,00  
 B (BAIK) = 76,61 - 88,30  
 C (KURANG BAIK) = 65,00 - 76,60  
 D (TIDAK BAIK) = 25,00 - 64,99

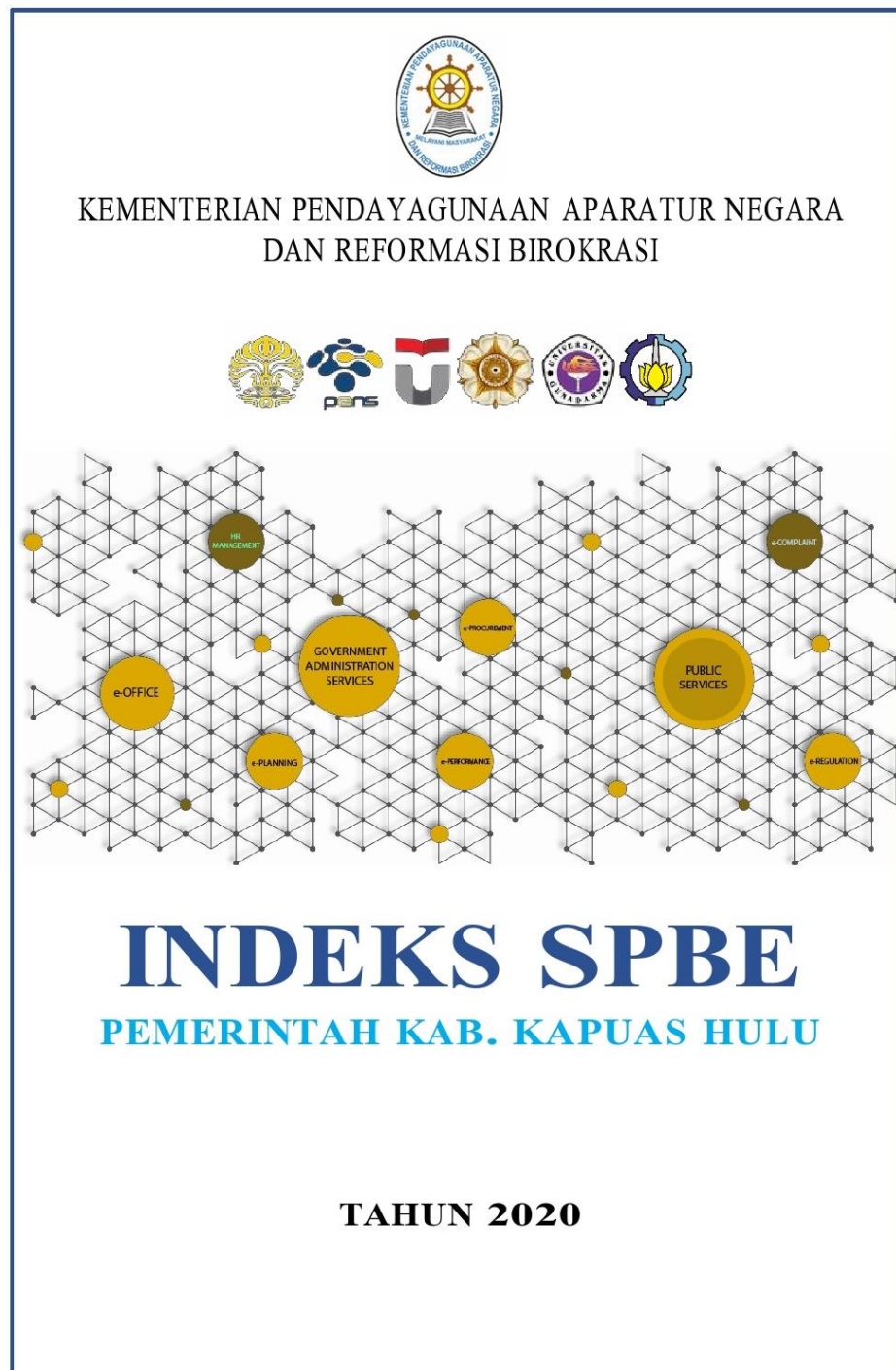
KETERANGAN :

- U1 - U9 = UNSUR-UNSUR PELAYANAN  
 IKM = INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
 NRR = NILAI RATA-RATA  
 NRR PER UNSUR = JUMLAH NILAI PER UNSUR DIBAGI JUMLAH KUESIONER YANG TERISI  
 NRR TERTIMBANG = NRR PER UNSUR X 0,111 PER UNSUR





Lampiran 6





### Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sudah dapat memperlihatkan predikat CUKUP dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE internal ada aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan memenuhi standar, selain terdapat beberapa kelemahan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih memiliki kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE dan Aspek Kelembagaan. Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sudah ada, walaupun masih tingkat pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara elektronik di Pemerintah Daerah, belum mencapai kolaborasi / integrasi. Sedangkan yang belum ada adalah kebijakan internal yang mengatur Layanan Naskah Dinas, Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen Kinerja, Layanan Pengaduan Publik, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Whistle-blowing system, dan Layanan Publik. Kebijakan-kebijakan ini harus dibuat sebagai dasar hukum penggunaan/penyediaan layanan-layanan tersebut. Dalam penerapan Aspek Kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola untuk Tim Pengarah SPBE yang masih untuk sebagian tugas dan fungsinya. Tata kelola untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi masih bersifat ad-hoc. Tata kelola Tim Pengarah SPBE sebaiknya berisi daftar jabatan, tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga bisa menjadi acuan walaupun ada pergantian personil. Secara keseluruhan, masih banyak yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, karena predikat SPBE yang diperoleh masih dalam kisaran CUKUP. Pembenahan dapat dimulai dengan melihat kebijakan dan tata kelola yang sudah ada. Jika sudah ada kebijakan, dapat ditindaklanjuti dengan tata kelola, ataupun sebaliknya. Demikian juga dalam hubungannya dengan layanan. Jika layanan sudah ada, tetapi dokumen kebijakan dan/atau tata kelola belum ada, maka dapat dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta.



harmonisasi/normalisasi dan sesuai Kepmenpanrb No 680/2020 tentang Penetapan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, bahwa pada proses bisnisnya pemanfaatan data SP4N Lapori telah terintegrasi; kekuatan lain adalah Layanan Publik Aplikasi Statistik Sektoral yang terhubung dengan aplikasi Dukcapil.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Layanan Whistle-blowing system dan satu Layanan Publik lagi, sedangkan fungsi pada proses bisnis Sistem JDIH Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bukanlah Proses Bisnis JDIH melainkan Proses Bisnis Content Management System dan JDIH merupakan media diseminasi peraturan perundang-undangan.

Publik dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.

#### C. Kelembagaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kelembagaan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah adanya tata kelola untuk Tim Pengarah SPBE yang berada pada tingkat terkelola.

- **Kekuatan**  
Belum terdapat kekuatan.
- **Kelemahan**  
Dalam penerapan Aspek Kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola untuk Tim Pengarah SPBE yang masih untuk sebagian tugas dan fungsinya. Tata kelola untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi masih bersifat ad-hoc.

#### D. Strategi dan Perencanaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Strategi dan Perencanaan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah adanya Rencana Induk SPBE yang telah terstandarisasi. Tata kelola Anggaran Belanja dan TIK masih pada tingkat terkelola.

- **Kekuatan**  
Belum terdapat kekuatan.
- **Kelemahan**  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola Anggaran Belanja dan TIK yang baru memenuhi sebagian dari kebutuhan saja.

#### E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah adanya tata kelola Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang terintegrasi dan terukur. Tata kelola Pengoperasian Pusat Data, dan Integrasi Sistem Aplikasi masih pada tingkat terkelola.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024.
- **Kelemahan**  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tata kelola Pengoperasian Pusat Data yang baru sebagian dimanfaatkan; dan Integrasi Sistem Aplikasi yang hanya dibuktikan oleh screenshot.

#### F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan, Layanan Manajemen Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Manajemen Kinerja pada tingkat transaksi. Layanan Pengadaan telah mencapai tingkat kolaborasi.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Layanan Pengadaan dengan menggunakan SPSE yang terintegrasi dengan SPBE Pusat.
- **Kelemahan**  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Layanan Naskah Dinas, karena masih menggunakan email saja.

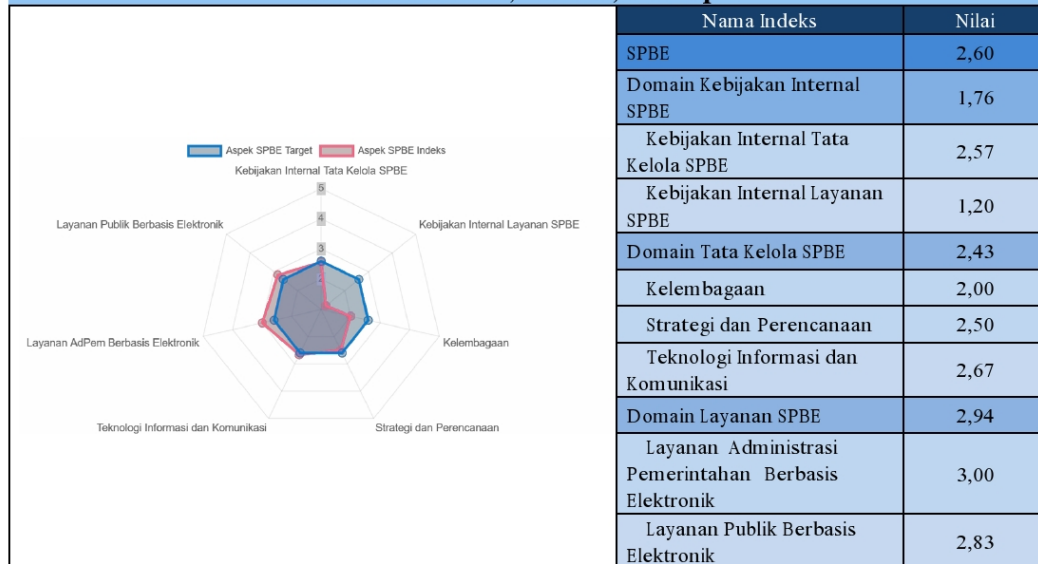
#### G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan Layanan Publik SIMBAJA, LAYANAN PENGADUAN PUBLIK, dan Layanan Publik Aplikasi Statistik Sektoral telah mencapai tingkat kolaborasi. Layanan JDIH berada pada tingkat interaksi.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki LAYANAN PENGADUAN PUBLIK yang menjadi kekuatan berdasarkan hasil konsensus

**INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU**
**2,60**

(Baik)

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

**Kekuatan dan Kelemahan**
**A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan adanya Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, dan Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi yang seluruhnya telah terstandarisasi. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, dan Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai masih pada tingkat terkelola.

- **Kekuatan**  
Belum terdapat kekuatan.
- **Kelemahan**  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kebijakan internal yang hanya mendukung pengaturan pada sebagian kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Anggaran dan Belanja TIK, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.

**B. Kebijakan Internal Layanan SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Pengadaan yang terstandarisasi.

- **Kekuatan**  
Belum terdapat kekuatan.
- **Kelemahan**  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur Layanan Naskah Dinas, Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen Kinerja, Layanan Pengaduan Publik, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Whistle-blowing system, dan Layanan



**EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020****Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

**Metodologi Evaluasi SPBE**

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

**Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses**

<b>1. Rintisan</b>	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc.
<b>2. Terkelola</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
<b>3. Terstandar-disasi</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
<b>4. Terintegrasi dan Terukur</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
<b>5. Optimum</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

**Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis**

<b>1. Informasi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
<b>2. Interaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
<b>3. Transaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
<b>4. Kolaborasi</b>	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
<b>5. Optimalisasi</b>	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>2.26</b>	<b>3.19</b>	<b>3.14</b>	<b>2.37</b>	<b>2.56</b>	<b>2.04</b>	<b>2.43</b>
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana,



Rini Wiyantini

**Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator**

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	2
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	1
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	1
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	1
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	2
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
21	Anggaran dan Belanja TIK	2
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	2
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4
25	Layanan Naskah Dinas	2
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	3
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan Whistle-Blowing System	1
35	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	3
36	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	3
37	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	4